

**Laporan**

**STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2007**



DITERBITKAN : DESEMBER 2007  
DATA : OKTOBER 2006 – DESEMBER 2007



**PEMERINTAH KOTA PELEMBANG  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, sehingga Pemerintah Kota Palembang dapat menyusun dan menerbitkan buku Laporan Staus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Palembang Tahun 2007.

Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Palembang Tahun 2007 ini disusun sesuai dengan Petunjuk Pelaksana (juklak) Pusat Informasi Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup serta hasil Konferensi UNEP yang telah disepakati Negara-negara di Kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia dan mengacu pada Metode "Pressure (Tekanan) – State (Kondisi) – Response (Reaksi)", walaupun masih ada kendala teknis/administrasi yang belum sempurna.

Ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan salah satu prasyarat utama untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien, merupakan salah satu upaya untuk menerapkan "Good Environmental Governance (CEG)", terutama berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen ini terdiri dari 2 (dua) buku yaitu:

- ❖ **Buku I (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah)**, menampilkan data-data isu-isu lingkungan hidup, kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, kondisi, penyebab dan dampak serta respon permasalahan terhadap media air, udara, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, serta berisikan agenda pengelolaan lingkungan hidup
- ❖ **Buku II (Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah)**, menampilkan data-data yang berkaitan dengan Status Lingkungan Hidup Daerah (termasuk data Air, Udara, Hutan dan Lahan, Limbah Padat, Kesehatan Masyarakat dan Kelembagaan).

Laporan ini terwujud atas hasil kerjasama yang baik antara Tim Penyusun dengan instansi terkait di Kota Palembang dan unsur lapisan masyarakat, sehingga tersusunnya Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Palembang Tahun 2007.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga bantuan dan kontribusi data yang bersumber dari instansi teknis/pihak terkait sangat diharapkan demi meningkatkan mutu penyusunan laporan pada tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya kami haturkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya memberi masukan dan kontribusi data untuk penyusunan buku ini. Semoga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Palembang.

Palembang, Desember 2007  
Kepala Bapedalda Kota Palembang

Ir. H. Kms. Abubakar. MM  
Pembina Tk. I Nip 440025319

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	❖ Tujuan Penulisan laporan
	❖ Visi dan Misi Kota
	❖ Gambaran Umum
BAB II	ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA
BAB III	AIR
BAB IV	UDARA
BAB V	LAHAN DAN HUTAN
BAB VI	KEANEKARAGAMAN HAYATI
BAB VII	AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tujuan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD)**

Kebijakan pembangunan berkelanjutan harus sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi atau Earth Summit tahun 1992 di Rio De Jenerio, Brasil.

Dalam pelaksanaan pembangunan akan muncul berbagai isu lingkungan sebagai akibat adanya benturan dan konflik kepentingan antara ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dengan jumlah populasi yang menggunakan dan mengeksploitasinya. Benturan dan konflik kepentingan ini menimbulkan berbagai beban pada lingkungan yang akan menjadi masalah seperti: pencemaran air, udara, tanah, sampah perkotaan dan limbah lainnya.

Upaya untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup, perlu dicermati dengan suatu kebijakan yang dapat menyentuh dan mengatasi suatu masalah lingkungan. Kebijakan lingkungan menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 22 huruf k menjelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah urusan wajibnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi kewajiban melestarikan Lingkungan Hidup.

Tujuan dari penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah tahun 2007 adalah :

1. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari system pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik
3. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan di Daerah

## **B. VISI dan MISI KOTA PALEMBANG**

Berdasarkan kondisi, potensi dan hasil kesepakatan stakeholders serta tujuan utama pembangunan Kota Palembang, maka Visi Kota Palembang Tahun 2004 – 2008 adalah:

"PALEMBANG KOTA METROPOLITAN, MANDIRI DAN BERKUALITAS TAHUN 2008"

Untuk merealisasikan Visi Kota Palembang tersebut, diperlukan misi sebagai komitmen dan arah dalam pengelolaan pembangunan di Kota Palembang. Adapun misi pembangunan Kota Palembang, adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, bermoral dan berbudaya sebagai pilar pembangunan kota
2. Meningkatkan penataan ruang serta sarana dan prasarana dasar perkotaan
3. Mendorong meningkatnya investasi, industri, perdagangan dan jasa serta pengembangan pariwisata dan pelestarian warisan sejarah budaya
4. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah
5. Melaksanakan pelayanan prima
6. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi aktif pembangunan Kota Palembang

### **C. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG**

Kota Palembang terletak pada posisi antara 2°52` sampai 3°05` Lintang Selatan dan 104°37` sampai 104°52` Bujur Timur dan secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan ;

Sebelah Utara	: Kabupaten Banyuasin
Sebelah Timur	: Kabupaten Banyuasin
Sebelah Selatan	: Kabupaten Ogan Ilir dan Kab. Banyu Asin
Sebelah Barat	: Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir

Suhu udara sebagian besar wilayah Kota Palembang berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Klas II Kenten Palembang (2007) berkisar antara rata rata 27.5oC dan curah hujan rata-rata/th 180,3 mm, terbesar jatuh pada bulan Januari, sedangkan Kelembaban udara rata rata 80 %, Kecepatan angin rata rata 6 km/jam dengan arahnya terbesar kearah Selatan.

Kota Palembang memiliki luas 400,61 Km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan dengan jumlah penduduk 1.338.793 jiwa. Kepadatan penduduk 3.342 Jiwa/Km<sup>2</sup> , Kecamatan Sukarame merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terbesar yaitu 24,60 % dari luas Kota Palembang, Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas paling kecil yaitu Kecamatan Ilir Barat II yaitu 1,55 % (Renstra Kota Palembang, 2006)

### **D. KEBIJAKAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA**

Adapun kebijakan dasar program-program pembangunan Kota Palembang sebagai berikut:

Kebijakan:

1. Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, kejuruan dan kesetaraan gender serta mengurangi penyakit masyarakat

Kebijakan:

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan kejuruan dan pengarusutamaan gender serta mengurangi penyakit masyarakat

Program:

1. Peningkatan pemerataan dan perluasan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan kejuruan serta berkurangnya jumlah buta aksara dan kesejajaran gender
2. Peningkatan kualitas aplikasi kurikulum kependidikan/ KBM i sekolah
3. Penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang pendidikan SD, SMP dan SMA/K
4. Pengaturan/kebijakan dalam Kota Palembang untuk lebih repsonsive Gender
5. Peningkatan Pengarustamaan gender di dinas instansi terkait
6. Pengembangan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberantasan buta aksara perempuan

Kebijakan:

3. Meningkatkan sumberdaya aparatur, keagamaan, seni budaya, olahraga dan kepemudaan

Program:

1. Peningkatan pendidikan formal, diklat struktural dan fungsional serta teknis bagi aparatur
2. Peningkatan sarana dan prasarana diklat aparatur
3. Penyelenggaraan diklat ketrampilan bekerjasama dengan BUMN dan swasta
4. Peningkatan kegiatan olahraga di tingkat Nasional
5. Pembangunan pusat-pusat keagamaan
6. Peningkatan kegiatan kesenian daerah Kota Palembang

Kebijakan:

4. Pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Program:

1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Pembudayaan lingkungan sehat
3. Upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
5. Perbaikan gizi masyarakat
6. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar

7. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
9. Membuat kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
10. Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan RSUD Palembang Bari
11. Pengembangan sarana prasarana gedung dan peralatan kesehatan canggih berteknologi tinggi di RSUD Palembang Bari

Kebijakan:

5. Merangsang tumbuhnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah-masalah sosial

Program:

1. Pembinaan partisipasi sosial masyarakat
2. Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
3. Pelayanan dan rehabilitasi sosial
4. Penanaman nilai-nilai kejuangan kepahlwanan dan pembinaan kerukunan sosial serta adat

Kebijakan:

6. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan

Program:

1. Penataan pemberdayaan dan penataan usaha mikro/informal di Kota Palembang
2. Meningkatkan jaringan dan usaha KUKM serta memperluas kesempatan kerja
3. Pembinaan industri kecil dan kerajinan rumah tangga
4. Pendayagunaan Teknologi tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan
5. Bantuan Dana Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEP-SP)
6. Peningkatan kelembagaan koperasi ekonomi

Kebijakan:

7. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan meningkatkan keterampilan masyarakat

Program:

1. Pemberdayaan masyarakat kelurahan pada proyek-proyek fisik
2. Bantuan dana stimultan pembangunan kerluahan, usaha informasi dan industri rumah tangga
3. Pembinaan Usaha Ekonomi produktif Simpan pinjam (UEP-SP)

Kebijakan:

8. Melaksanakan semua ketentuan yang berlaku tentang penataan ruang dan lingkungan perkotaan

Program:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang dan lingkungan perkotaan
2. Penataan kawasan tepian sungai

Kebijakan:

9. Melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kumuh 14 kecamatan dipenuhi pelayanannya

Program:

1. Pembangunan sanitasi lingkungan dan pembangunan infrastruktur lingkungan kumuh

Kebijakan:

10. Meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau
11. Meningkatkan cakupan penerangan jalan umum

Program:

1. Penanaman dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)/Ruang Milik Jalan
2. Penataan ruang milik jalan dan hutan kota
3. Penghijauan kota dan pemeliharaan pohon pelindung
4. Pembangunan dan pemeliharaan pertamanan dan PJU

Kebijakan:

12. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

Program:

1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi serta manajemen transportasi kota
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, drainase serta pengendalian banjir termasuk sarana dan prasarana air bersih
3. Revitalisasi pasar tradisional, pelestarian hutan kota dan penghijauan kota di 14 kecamatan
4. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan pemakaman
5. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar tradisional
6. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan, utilitas dan pertamanan kota

Kebijakan:

13. Mengkondisikan sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai sektor ekonomi yang potensial bagi investor untuk berinvestasi, sehingga tiga sektor tersebut bisa lebih berkembang

Program:

1. Promosi potensi dan peluang investasi, melalui media yang informatif sesuai dengan sasaran
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi serta jaminan keamanan dan perlindungan hukum
3. Mengembangkan informasi pasar melalui promosi, penyebarluasan informasi pasar dan pengembangan keterkaitan pasar
4. Mendorong pertumbuhan ekspor
5. Memfasilitasi lembaga pendanaan yang akomodatif untuk menunjang permodalan, termasuk di dalamnya lembaga penjaminan kredit yang menghubungkan antara industri kecil dengan lembaga pendanaan.

Kebijakan:

14. Mengkondisikan sektor-sektor ekonomi lainnya bisa lebih berkembang sebagai mata rantai yang saling terkait dengan sektor industri, perdagangan dan jasa

Program:

1. Membina dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi
2. Menciptakan pola kemitraan usaha (aliansi strategis) antara industri kecil dengan industri menengah dan besar serta pasar modern
3. Memadukan dan mengkoordinasikan secara vertikal antara usaha pertanian, industri, perdagangan dan jasa untuk memaksimalkan penciptaan nilai tambah
4. Mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berorientasi pada permintaan pasar
5. Membangun, memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana dasar untuk percepatan pembangunan khususnya di kawasan sentra produksi
6. Penataan kawasan industri, pergudangan dan perdagangan termasuk di dalamnya normalisasi pasar-pasar tradisional
7. Pembinaan dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

Kebijakan

15. Menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor pariwisata bisa berkembang
16. Menciptakan kondisi yang memungkinkan sejarah budaya bisa tetap lestari

Program:

1. Penataan dan pengembangan objek dan daya tarik serta sarana prasarana wisata
2. Promosi objek-objek wisata

Kebijakan

17. Meningkatkan target penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keterpaduan peluang investasi dan prinsip ketentuan perundang-undangan/hukum

Program:

1. Pemantapan kegiatan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan terhadap objek pajak dan pengembangan potensi PAD secara optimal

2. Sosialisasi tentang pajak daerah, retribusi daerah dan PBB serta pembinaan dan pengembangan operasional objek pajak maupun retribusi daerah

Kebijakan

18. Mengelola belanja daerah secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip anggaran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Program:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan daerah dan belanja daerah serta penggunaan pembiayaan untuk belanja apartur dan belanja publik

Kebijakan

19. Mengelola pembiayaan daerah secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip anggaran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Program:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan secara benar untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah

Kebijakan

20. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku oleh setiap unit kerja

Program:

1. Dukungan pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
2. Pemberdayaan fungsi pengawasan sebagai suatu sistem pengendalian manajemen

Kebijakan

21. Membuat pedoman baku Standar Minimum Pelayanan (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Manajemen Prosedur Pengaduan (MPP) berdasarkan prinsip-prinsip manajemen administrasi yang baik

Program:

1. Pembangunan dan sarana prasarana yang mendukung penciptaan keamanan dan ketertiban umum maupun pelayanan prima, termasuk dibidang kebakaran

Kebijakan

22. Meningkatkan kemampuan aparatur pelayanan pada masing-masing instansi

Program:

1. Sosialisasi terencana pelayanan publik dan kawasan lingkungan
2. Penetapan Standar Minimum Pelayanan (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Manajemen Prosedur Pengaduan (MPP)
3. Perencanaan kawasan tertib.

Kebijakan

23. Mewujudkan kerjasama antara Kota Palembang dan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri

Program:

1. Mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan dengan daerah lain, pihak lain di dalam dan di luar negeri (Sister City)
2. Mewujudkan Metropolitan Palembang bekerjasama dengan Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, Muara Enim (PAKIBANIM)
3. Menyelenggarakannya perjanjian kerjasama perencanaan kota
4. Pengelolaan dan pembangunan fasilitas umum di daerah perbatasan, seperti TPA, perkuburan umum, sekolah dasar

Kebijakan

24. Mengembangkan kerjasama infrastruktur ekonomi kota yang produktif

Program:

1. Kerjasama pembangunan sarana prasarana ekonomi di daerah perbatasan, seperti jalan desa
2. Membangun daerah hiterland sebagai suplier kebutuhan bahan baku kota

Kebijakan

25. Menyelenggarakan pembinaan dan memilih model pendidikan yang terkait dengan kebutuhan pasar kerja

Program:

1. Penataan terpadu peningkatan kualitas tenaga pendidik
2. Pembangunan bersama infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, daerah perbatasan kota

Kebijakan

26. Menyelenggarakan event budaya dan wisata, secara periodik dan berkelanjutan, berbasis air

Program:

1. Penyediaan fasilitas angkutan air untuk wisata (kapal wisata, Musi Tour)
2. Penyelenggaraan pekan budaya, seni dan aktifitas wisata air

Kebijakan

27. Menyelenggarakan koordinasi penyelarasan rencana pembangunan perbatasan

Program:

1. Pemetaan dan penetapan tanda dan tapal batas daerah

Kebijakan

28. Menyelenggarakan identifikasi, masalah dan pemecahan daerah perbatasan

Program:

1. Menyusun secara bersama program prioritas di daerah perbatasan
2. Rapat regional terpadu lintas daerah berbatasan



## **BAB II**

### **ISU UTAMA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PALEMBANG**

Kota Palembang terletak pada posisi belahan timur pulau Sumatera yang merupakan dataran rendah dan berawa, serta terdapat perbedaan karakter topografi antara seberang ulu dengan seberang ilir, bagian wilayah seberang ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada dibawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi kecuali lahan yang telah dibangun dan akan dibangun, dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan

Dibagian seberang ilir adanya variasi topografi 4 s/d 20 meter diatas permukaan laut dan serta tidak terdapat topografi yang terjal. Sampai jarak 5 km ke arah Utara Sungai Musi kondisi topografi relatif menaik dan setelah itu semakin ke utara menurun kembali.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka terhadap kegiatan kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan diwajibkan untuk membuat kajian lingkungan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL), Sebagai mana dimaksud oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002, pada kenyataannya dilapangan masih banyak investor yang tidak mengindahkan dan mengacu ke pada peraturan tersebut dimana masih lemahnya penegakan hukum lingkungan dan lemahnya aspek lingkungan.

No	Isu isu Lingkungan
1	Banjir
2	Kependudukan dan Kemiskinan
3	Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Lingkungan
4	Kemacetan Lalu Lintas
5	Pencemaran Air Sungai Musi dan Anak sungai
6	Pencemaran Udara

## 1. Banjir

Permasalahan banjir merupakan isu lingkungan yang selalu terjadi tiap tahun bagi Kota Palembang pada musim penghujan. Dimana penyebabnya adalah berkurangnya area tangkapan air ( catchment area) seperti rawa rawa dan karena telah ditimbun untuk menunjang pembangunan perumahan dan pertokoan. Penyebab banjir juga dapat disebabkan adanya sampah di saluran air sehingga menyumbat drainase serta pengaturan tata air belum sempurna serta kurangnya kolam retensi sehingga banyak air yang tergenang

Berdasarkan data yang ada dampak dan kerugian yang diakibatkan dari banjir adalah rusaknya infrastruktur atau sarana umum seperti, jalan dan jembatan, perabot rumah tangga, sekolah, dan lainnya sehingga sanitasi lingkungan akan terganggu yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit terhadap masyarakat.

Di wilayah Kota Palembang saat ini masih terdapat daerah rawan banjir dan terdapat 51 lokasi genangan . Berdasarkan survey Palembang Urban Development Program II (PDUP II), luas genangan di Kota Palembang adalah 126,87 Ha, frekuensi genangan sekitar 75 kali dalam setahun, tinggi genangan rata-rata 0,33 m dan lama genangan rata-rata 4,63 jam. Pada bulan September – Desember 2003 Kota Palembang dilanda bencana banjir yang membawa kerugian tidak sedikit bagi masyarakat antara lain rusaknya beberapa prasarana dan sarana perkotaan dan menyebarkan penyakit.

Penyebab utama banjir dan genangan di Kota Palembang antara lain adalah sebagai berikut:

- Kondisi topografi Kota Palembang yang relative datar dan rendah sehingga sangat dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Musi
- Adanya pendangkalan Sungai Musi dan anak-anak sungainya, kondisi ini memerlukan upaya normalisasi sungai
- Semakin meningkatnya pembangunan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan penimbunan rawa. Hal ini perlu dikendalikan/ditertibkan
- Penurunan kinerja drainase yang disebabkan oleh sampah, pendangkalan dan kerusakan. Keadaan ini membutuhkan peningkatan manajemen persampahan
- Kurang tersedianya kolam-kolam retensi, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan system tata air.
- Belum adanya konsep drainase terpadu dan penetapan area konservasi rawa
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase

## 2. Kependudukan dan Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kota Palembang 1.338.793 jiwa ( BPS 2005) dengan Kepadatan penduduk 3.342 Jiwa/Km<sup>2</sup> dimana laju pertumbuhan 2,6 % , penduduk Kota Palembang tersebar pada 14 Kecamatan 103 Kelurahan dimana jumlah laki laki 646.637 jiwa dan perempuan 692.156 jiwa.

Pertambahan penduduk mendorong ekonomi dan industri tumbuh pesat untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan, papan , air bersih dan energi yang terus meningkat.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk juga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran udara, pencemaran air sungai dan badan air lainnya oleh limbah industri, limbah rumah tangga hingga limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang tidak ditangani serta tidak tersedianya air bersih yang cukup menjadi persoalan.

Disamping itu dengan peningkatan pertumbuhan penduduk maka pembangunan sering tidak terkontrol dimana pembangunan perumahan dan pertokoan sering tidak menghiraukan lingkungan sehingga pohon ditebang rawa ditibun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

## 3. Rendahnya Tingkat Kesadaran masyarakat Kota Palembang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan maka apapun yang dilakukan pemerintah hasilnya tidak akan maksimal

Komitmen para swasta dalam kepedulian terhadap lingkungan masih sangat kurang untuk menjaga lingkungan dimana mereka hanya berorientasi pada keuntungan tidak mau menjaga lingkungan. Itu tercermin dari masih banyaknya kegiatan/usaha yang tidak mempunyai kajian lingkungan baik itu AMDAL atau UKL-UPL . Walaupun ada pengusaha/kegiatan belum mematuhi arahan arahan yang tercantum dalam dokumen mereka hanya menganggap bahwa Kajian Lingkungan hanya sebagai persyaratan untuk mendapatkan perizinan.

#### 4. Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagian kota-kota besar, demikian halnya Kota Palembang. Sejalan dengan penambahan penduduk dan berkembangnya aktivitas masyarakat, telah terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan dan persimpangan. Kemacetan lalu lintas ini membawa beberapa dampak kerugian antara lain pemborosan BBM, pemborosan waktu (produktivitas kerja) dan pencemaran udara.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan, bahwa ruas jalan dan persimpangan jalan di Kota Palembang yang telah melewati atau mendekati batas V/C Ratio 0,80 (ambang batas kemacetan) adalah Jl. AKBP Cek Agus (V/C = 0.89), Jl.Dr.M.Isa (0.78), Jl. Jenderal Sudirman (0.71), Jl. Burlian (0.72), Jl. MP. Mangkunegara (0.95), Jl. Ryacudu (0.99), Jl. Brigjen Dani Effendi (0.73), Simpang POLDA (0.80), Simpang Sekip (0.79), Simpang PATAL (0.68) dan Simpang Dolog (0.73).

Adapun penyebab utama dari kemacetan lalu lintas antara lain adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan kendaraan (8%) jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ruas jalan (2%)
- Struktur urang Kota Palembang yang bersifat konsentris dengan CBD di sekitar Pasar 16 Ilir sehingga pusat kegiatan ekonomi menumpuk di sekitar lokasi tersebut
- Jalan Jenderal Sudirman merupakan poros utama transportasi Kota Palembang sehingga hampir semua jalur angkutan melewati jalan tersebut.
- Masih adanya kendaran tua (tidak layak jalan) melewati jalan-jalan protokol
- Kurangnya fasilitas jembatan yang menghubungkan antara Palembang Ilir dan Palembang Ulu (dalam kota hanya ada Jembatan Ampera dan Musi II), sehingga arus lalu lintas yang menghubungkan kedua wilayah tersebut menumpuk di sekitar wilayah Jembatan Ampera seperti Jl. Jend.Sudirman, Jl. Merdeka, Jl. Ryacudu, sekitar pasar 16 Ilir, Jl.A.Yani dan Jl.Wahid Hasyim
- Kondisi perparkiran yang sebagian besar (70%) bersifat *on street parking* yang memanfaatkan badan jalan
- Adanya beberapa ruas jalan yang terganggu aktivitas pasar dan pedagang kaki lima antara lain di Jl. Jend.Sudirman (Pasar 16 Ilir), Jl. KM.Burlian (Pasar Km 5), Jl RE. Martadinata (Pasar Lemabang) dan sekitar Pasar Plaju
- Manajemen transportasi yang belum terpadu (belum ada *masterplan* transportasi)

- Kondisi beberapa simpang jalan yang sudah tidak memadai lagi antara lain Simpang RS RK Charitas, Simpang Sekip, Simpang POLDA, Simpang PATAL-PUSRI dan Simpang Dolog.
- Kesadaran pengguna jalan masih kurang.

#### 5. Pencemaran Air

Pencemaran air erat kaitannya dengan aktivitas manusia, karena segala aktivitas sangat tergantung pada bahan baku air.

Penelitian maupun studi khusus tentang pencemaran air masih sangat terbatas pada kegiatan program kali bersih (PROKASIH), khususnya pencemaran oleh kegiatan industri yang telah terpantau adalah beban pencemaran BOD, COD dan TSS.

Tingkat pencemaran air dipengaruhi oleh sebagian besar berlokasi dipinggir Sungai Musi. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan industri pupuk, pengolahan minyak bumi/kilang minyak, pengolahan kayu dan pengolahan karet juga industri makanan dan minuman.

Sebagian besar industri tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung membuang limbahnya berupa cairan dan padat ke Sungai Musi. Dari gambaran tersebut jelaslah bahwa tingkat pencemaran di Sungai Musi dapat terus meingkat. Apalagi bila limbah dari kegiatan-kegiatan sektor industri, domestik tidak dilakukan daur ulang, pengolahan terlebih dahulu.

Secara umum industri-industri yang berskala besar di Kota Palembang seperti PT PUSRI, PT PERTAMINA (Persero) dan pengolahan karet pada dasarnya sudah membuat unit Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) untuk limbah cairnya.

#### 6. Pencemaran Udara

Pencemaran Udara saat ini telah menjadi masalah yang cukup serius di kota-kota besar di Indonesia dalam decade terakhir ini dimana kendaraan bermotor merupakan penyebab utamanya. Sumber lain berasal dari pabrik-pabrik pengolahan antara lain dari kilang minyak, crumb rubber, cool storage (udang) dan lain-lain.

Beban pencemaran lain adalah sumber tetap (konsumsi bahan bakar) dan sumber bergerak (konsumsi bahan bakar). Sumber tetap terdiri dari PLTU,

PLTD, Power House di peratmina dan PT PUSRI. Untuk sumber bergerak dari angkutan darat, sungai dan udara.

Parameter penyebab pencemaran udara terdiri gas-gas SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, HC (Hidrokarbon), Pb, NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> dan partikel debu. Potensi pencemaran udara ambien di Kota Palembang terutama pada daerah padat transportasinya yaitu di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Simpang POLDA, Simpang 4 RSRK Charitas.

## BAB III

### AIR

#### 3.1. Kondisi, Penyebab dan Dampak

Sungai Musi merupakan sungai besar yang mengalir ke arah timur Kota Palembang dan bermuara ke Selat Bangka. Sungai Musi memiliki panjang  $\pm 750$  km dengan debit bervariasi antara  $2.700 \text{ m}^3/\text{detik}$  pada musim kemarau dan mencapai  $4.000 \text{ m}^3/\text{detik}$  pada musim penghujan. Sungai Musi mempunyai peranan yang sangat besar bagi masyarakat di Kota Palembang. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan terkonsentrasinya sebagian pemukiman penduduk dan kegiatan di daerah aliran sungai tersebut

Kondisi ini juga didukung oleh topografi Kota Palembang yang tergenang secara terus-menerus seluas 37%, lahan tergenang musiman 15% dan tanah daratan 48%.

Potensi sumberdaya air yang tersebar di wilayah Kota Palembang berasal dari sungai, rawa lebak dan rawa pasang surut. Jika dilihat dari sistem drainase Kota Palembang, adanya kecenderungan debit air semakin ke hilir semakin meningkat, dibagian hulu Pulokerto debit air  $1.900 \text{ m}^3/\text{detik}$ , sedangkan di bagian hilir yaitu sekitar PT PUSRI debit air  $5.115 \text{ m}^3/\text{detik}$ . Hal ini terutama disebabkan adanya tambahan debit air dari anak-anak Sungai Musi yang ada di bagian hilir dan adanya tambahan air dari daerah tangkapan di bagian hilir.

Kebutuhan air bersih Kota Palembang sebagian besar dipenuhi oleh PDAM Tirta Musi dan sebagian memanfaatkan air permukaan seperti air sungai, kolam/rawa dan air tanah. Sedangkan untuk beberapa kompleks perumahan, perusahaan dan atau perumnas dipenuhi oleh masing-masing perusahaannya seperti Pertamina/PUSRI dan PT TOP/OPI serta Perumnas Talang Kelapa. PDAM Tirta Musi memiliki 6 unit instalasi pengolahan air dengan kapasitas terpasang  $1.825,5 \text{ liter/detik}$  dari kapasitas produksinya yang seharusnya  $36.940 \text{ liter/detik}$ . Kapasitas produksi air minum selama tahun 2002 sebesar  $61.308.868 \text{ m}^3$  meningkat 13,57% dari tahun sebelumnya. Air minum tersebut akan didistribusikan kepada 86.083 pelanggan sebanyak  $59.442.580 \text{ m}^3$ .

Timbulan air limbah sangat dipengaruhi oleh pola pemakaian air bersih, pada umumnya timbulan air limbah yang dihasilkan kurang lebih 70%-80% dari pemakaian air bersih. Pada saat ini pengolahan air limbah perumahan di Kota Palembang menggunakan pola penanganan setempat atau "*on Site System*" yang berdasarkan Susenas Tahun 2005 (BPS Sumsel, 2006), rumah tangga

yang memiliki MCK sendiri sebanyak 75,51 %, fasilitas bersama 15,87%, fasilitas Umum sekitar 2,51% dan tidak memiliki MCK sebanyak 6,10%. Sistem setempat (*on site*) dominan berada di kawasan perumahan, masing-masing rumah mengalirkan air limbah ke tangki septic (septic tank). Untuk perumahan dengan kapling relative kecil (perumahan relative padat) menggunakan system terpusat atau komunal. Pembuangan air limbah Kota Palembang terlebih dahulu diolah di IPLT (Instalasi Pengoalahan Limbah Tinja). Instalasi Pengolahan Limbah Tinja terdapat di Borang (Sako) dan Kelurahan Sukajaya (Sukarami) yang berintegrasi dengan TPA sampah.

Berdasarkan hasil survey lapangan dan analisa laboratorium untuk studi kajian evaluasi kualitas air Sungai Musi dan anak-anak sungai dalam wilayah Kota Palembang Tahun 2005 dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH Unsri), maka hasil analisisnya sebagai berikut:

#### **a. Karakteristik Fisika**

##### *a.1. Temperatur*

Dari hasil pengukuran pada tujuh lokasi air sungai (Sungai Sekanak, Sungai Bendung, Sungai Buah, Sungai Sriguna, Sungai Borang, Sungai Gasing, dan Sungai Musi), nilai temperature rata-rata masih memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

##### *a.2. Zat Padat Terlarut*

Dari hasil pengamatan penyebab utama terjadinya padatan terlarut disekitar sungai yang diamati adalah pada saat pengambilan sample musim hujan, dimana air hujan membawa partikel, maupun solid-solid yang ada di daratan menuju badan air sehingga menyebabkan air menjadi keruh. Dari hasil pengukuran kandungan zat padat terlarut untuk tujuh air sungai di atas menunjukkan bahwa kandungan zat padat terlarut masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 1.000 µg/l.

#### **b. Karakteristik Kimia**

##### *b.1. Tingkat Keasaman (pH)*

Nilai pH air yang normal adalah sekitar netral, sedangkan pH air yang terpolusi misalnya air buangan berbeda-beda tergantung dari jenis buangannya. Perubahan keasaman pada air buangan, baik ke arah alkali maupun ke arah asam, akan sangat mengganggu kehidupan ikan dan hewan air di sekitarnya.

Dari hasil pengukuran pH menunjukkan bahwa nilai pH pada semua lokasi contoh memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

#### b.2. *Hidrogen Sulfida (H<sub>2</sub>S)*

Senyawa H<sub>2</sub>S merupakan senyawa yang terbentuk dari penguraian anaerobik dari penguraian anaerobik terhadap senyawa yang mengandung belerang. Senyawa ini akan menimbulkan bau dan warna pada badan air dimana H<sub>2</sub>S ini bersifat racun terhadap biota perairan.

Dari hasil kandungan H<sub>2</sub>S pada tujuh lokasi badan air penerima yang dikaji menunjukkan bahwa kandungan H<sub>2</sub>S masih dibawah baku mutu lingkungan.

#### b.3. *Amoniak Bebas*

Amoniak dalam air permukaan dapat berasal dari hasil degradasi baik secara aerobik maupun anaerobik bahan yang mengandung unsur nitrogen seperti protein. Adanya amoniak dalam air permukaan dapat menimbulkan bau.

Batas maksimum amoniak bebas yang diperbolehkan adalah 0,5 mg/l. Hasil analisa amoniak bebas menunjukkan bahwa pada beberapa badan air yang diamati menunjukkan nilai yang telah melebihi baku mutu yang ditetapkan, badan air tersebut adalah enam sungai pada semua contoh, kecuali di hilir Sungai Sriguna.

Tingginya kandungan amoniak bebas pada badan-badan air tersebut kemungkinan disebabkan oleh banyaknya limbah domestik organik yang masuk dan terurai di dalam badan air tersebut serta adanya aktivitas kegiatan industri terutama di Sungai Musi.

#### b.4. *Phenol Total*

Phenol adalah senyawa golongan berbahaya dan beracun (B3). Senyawa ini termasuk senyawa yang sukar didegradasi oleh mikroorganisme bahkan termasuk dalam desinfektan. Phenol dapat mengganggu kehidupan biota perairan dan menyebabkan limbah cair menjadi berwarna dan berbau.

Dari hasil analisa kandungan phenol total pada beberapa badan air yang diamati menunjukkan nilai yang telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, badan air tersebut adalah Sungai Sekanak di bagian hilir, Sungai Bendung pada semua lokasi contoh, sebagian lokasi contoh di Sungai Buah, di hilir Sungai Sriguna, Sungai Borang pada semua lokasi contoh, Sungai

Gasing pada semua lokasi contoh dan Sungai Musi pada semua lokasi contoh.

Tingginya kandungan phenol total pada badan-badan air penerima tersebut kemungkinan disebabkan oleh banyaknya limbah domestic organic yang masuk dan terurai di dalam badan air tersebut.

#### *b.5. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)*

Nilai COD menunjukkan kandungan bahan organik dan anorganik yang dapat didegradasi, yang dinyatakan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses degradasinya. Makin tinggi nilai COD dalam air maka kualitas air tersebut makin buruk. COD yang tinggi akan terjadi deficit (berkurangnya) oksigen terlarut dan selanjutnya mengganggu kehidupan biota perairan seperti nekton (ikan).

Untuk air permukaan, batas maksimum COD yang diperbolehkan adalah 10 mg/l. Dari hasil kandungan COD dalam air permukaan yang dikaji diketahui bahwa pada seluruh lokasi contoh pada ketujuh badan air yang diamati telah melebihi baku mutu yang ditetapkan.

Tingginya kandungan COD pada badan-badan air tersebut kemungkinan disebabkan oleh banyaknya limbah industri dan limbah domestik yang masuk dan terurai di dalam badan air tersebut.

#### *b.6. Kebutuhan Oksigen Terlarut (BOD)*

Nilai BOD<sub>5</sub> menunjukkan kandungan bahan organik yang dapat didegradasi yang dinyatakan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses degradasinya. Makin tinggi nilai BOD<sub>5</sub> dari suatu air permukaan, maka kualitas air permukaan tersebut semakin buruk. BOD<sub>5</sub> yang tinggi menggambarkan defisit (berkurangnya) oksigen terlarut pada air permukaan, padahal komponen ini dibutuhkan oleh biota perairan seperti nekton. Baku mutu BOD<sub>5</sub> adalah 2 mg/l untuk air permukaan.

Dari hasil analisis kandungan BOD<sub>5</sub> dalam air permukaan yang dikaji diketahui bahwa seluruh lokasi contoh pada ketujuh badan air yang diamati telah melebihi baku mutu yang ditetapkan.

Tingginya kandungan BOD pada badan-badan air tersebut kemungkinan disebabkan oleh banyaknya limbah domestic organic yang masuk dan harus diuraikan oleh badan air tersebut.

#### **b.7. Logam Berat**

Air sering tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Logam berat pada umumnya seperti campuran Tembaga (Cu), Krom Hexavalen ( $\text{Cr}^{6+}$ ), kromium total (Cr), Timbal (Pb) dan Aluminium (Al). Metal lain yang termasuk metal berat adalah Mangan (Mn) dan Besi (Fe) yang teroksidasi dalam air berwarna kecoklatan dan tidak larut menyebabkan penggunaan air menjadi terbatas. Air tidak dapat dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri.

Dari hasil analisis kandungan logam berat dalam air permukaan yang dikaji ditemukan beberapa jenis logam antara lain Seng, Tembaga, Besi, Mangan dan Crom yang nilainya telah melebihi baku mutu.

Tingginya kandungan logam berat pada badan-badan air tersebut kemungkinan disebabkan oleh banyaknya limbah domestik terutama berupa kaleng bekas, limbah dari industri kecil menengah dan limbah dari bengkel kendaraan bermotor.

#### **b.8. Sulfat**

Sulfat dalam jumlah besar akan menaikkan keasaman air. Dari hasil analisa kandungan sulfat dalam air permukaan yang dikaji diketahui bahwa pada seluruh lokasi contoh pada ketujuh badan air yang diamati nilai Sulfatnya masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

#### **b.9. Nitrat dan Nitrit**

Tinggi rendahnya nitrat dan nitrit dalam air ditentukan oleh senyawa nitrogen dan oksigen yang diuraikan oleh bakteri. Nitrit dalam jumlah yang besar akan mengikat oksigen dalam air yang mengakibatkan air kekurangan oksigen, DO nya rendah. Batas maksimum nitrat yang diperbolehkan adalah 10 mg/l, sedangkan nitrit adalah 0.06 mg/l.

Dari hasil analisis kandungan Nitrat dan Nitrit dalam air permukaan yang dikaji diketahui bahwa pada seluruh lokasi contoh pada ketujuh badan air yang diamati telah melebihi baku mutu yang ditetapkan.

Tingginya kandungan Nitrat dan Nitrit pada badan-badan air tersebut kemungkinan disebabkan oleh banyaknya limbah domestik organik yang masuk dan terurai di badan air tersebut.

**b.10. Oksigen Terlarut (DO)**

Oksigen terlarut merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan tanaman dan hewan di dalam air. Kehidupan makhluk hidup di dalam air tergantung dari kemampuan air untuk mempertahankan konsentrasi oksigen minimal yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Biota air hangat memerlukan oksigen terlarut minimal 5 ppm, sedangkan biota air dingin memerlukan oksigen terlarut mendekati jenuh. Konsentrasi oksigen terlarut minimal untuk kehidupan biota tidak boleh kurang dari 6 ppm. Konsentrasi oksigen terlarut dalam keadaan jenuh tergantung dari suhu dan tekanan atmosfer. Pada suhu 20<sup>0</sup>C dengan tekanan satu atmosfer konsentrasi oksigen terlarut dalam keadaan jenuh 9, 2 ppm, sedangkan pada suhu 50<sup>0</sup>C dengan tekanan atmosfer yang sama tingkat kejenuhannya 5,6 ppm.

Semakin tinggi suhu air, semakin rendah tingkat kejenuhan oksigen terlarut. Konsentrasi oksigen terlarut yang terlalu rendah akan mengakibatkan ikan-ikan dan binatang air lainnya yang membutuhkan oksigen akan mati. Sebaliknya konsentrasi oksigen terlarut yang terlalu tinggi juga mengakibatkan proses perkaratan semakin cepat karena oksigen akan mengikat hidrogen yang dilapisi permukaan logam.

Dari hasil pengukuran kandungan oksigen terlarut pada seluruh lokasi contoh air sungai yang dikaji masih memenuhi kisaran baku mutu yang ditetapkan.

**b.11. Sedimentasi Sungai**

Hasil pengamatan dan pengukuran ketebalan sedimentasi di lapangan menunjukkan bahwa hampir pada seluruh yang dikaji telah dipenuhi oleh endapan lumpur. Endapan ini terutama berasal dari limbah domestik dan laju erosi tanah di bagian hulu sungai.

Tabel 3.1. Parameter kualitas Air yang berada Di atas Baku Mutu

No.	Nama Sungai	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kondisi Umum Saluran Drainase/Sungai Saat ini
1.	Sungai Sekanak	11,40	Endapan lumpur 30-50 cm Terdapat sampah dan gulma air
2.	Sungai Buah	10,42	Endapan lumpur 40-50 cm Kondisi saluran terdapat sampah
3.	Sungai Borang	71,21	Endapan lumpur > 30 cm Terdapat sampah dan gulma air
4.	Sungai Gasing	52,11	Saluran terdapat lumpur hingga 50 cm. Gulma dan enceng gondok
5.	Sungai Bendung	19,19	Endapan lumpur 30-50 cm Terdapat sampah dan gulma air
6.	Sungai Sriguna	4,91	Kedalaman lumpur mencapai 35 cm Terdapat sampah dan gulma air
7.	Sungai Musi di Palembang	-	Terdapat sampah limbah domestic dan sumbangan sediment dari atas: Hasil studi JICA Erosi Tanah di Bagian Hulu 180 ton/th/km <sup>2</sup>

Sumber: Bapedalda Kota Palembang – PPLH Unsri (2005)

Sumber pencemaran air dapat digolongkan menjadi sumber pencemaran domestik yaitu yang berasal dari rumah tangga penduduk dan perkotaan seperti mandi, cuci, masak sampai pembuangan kotoran (limbah manusia dan aktivitasnya) juga yang tidak kalah pentingnya adalah sumber pencemaran dari aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan, pertanian ataupun sector jasa seperti rumah sakit, hotel/restoran.

Di Kota Palembang sumber pencemaran yang berasal dari aktivitas industri antara lain industri pupuk, industri pengolahan minyak bumi, industri pengolahan karet (crumb rubber), industri makanan dan minuman dan juga industri-industri rumah tangga antara lain tahu dan tempe.

### **3.2. Respon Permasalahan terhadap Media Air**

Beberapa program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Bapedalda Kota Palembang, antara lain:

1. Program Cinta Kali Bersih / Cinta Kasih merupakan gerakan bersih-bersih sampah di Sungai Musi secara terjadwal dan rutin dengan melibatkan masyarakat.
2. Program Identifikasi dan Evaluasi Kualitas Air Sungai Musi kerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unsri
3. Program Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan yang berada di pinggir sungai, berupa:
  - Setiap perusahaan yang berada dipinggir sungai telah memiliki dokumen kajian lingkungan
  - Pembinaan pengawasan dan pengendalian secara rutin dilakukan oleh Bapedalda Kota Palembang
  - Pelaksanaan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
4. Sejak tahun 2003, Bapedalda Kota Palembang sudah memiliki Laboratorium Lingkungan, saat ini masih dalam proses Akreditasi

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk pengendalian pencemaran air di Sungai Musi sudah cukup memadai, namun yang perlu dilakukan pada saat ini dan masa depan adalah pengendalian pencemaran yang terjadi di tingkat rumah tangga.

Untuk mengelola sumberdaya alam dengan pendekatan ekosistem dengan memperhatikan unsur biogeofisikosekbud maka diperlukan arahan pengelolaan dan pengembangan tidak hanya Daerah Aliran Sungai Musi bagian hilir, namun lebih diprioritaskan bagian hulu. Secara umum arahan pengelolaan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

#### **A. Arahan Teknis (Konservasi Tanah dan Air)**

##### **A.1. Penerapan Usahatani Konservasi**

Usahatani konservasi adalah usahatani yang disertai dengan penerapan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air yang lebih menekankan pada pola pengaturan pertanaman, tanpa banyak melibatkan pembuatan struktur bangunan pengendali erosi. Bentuk-bentuk usaha tani konservasi antara lain:

- a. pemilihan jenis tanaman yang dibudidayakan, harus memprioritaskan jenis-jenis tanaman yang mempunyai dampak positif terhadap usaha konservasi tanah dan air,
  - b. Pengaturan pola pertanaman yang mempunyai fungsi konservasi, seperti rotasi tanaman, tumpang gilir, tumpang sari atau monokultur
  - c. Pengaturan bentuk pertanaman, seperti pertanaman lorong (alley cropping) dan pertanaman sejajar kontur
  - d. Pemberian mulsa
  - e. Penerapan usahatani dengan pengolahan tanah minimum
  - f. Penanaman covercrop pada usahatani perkebunan
- A.2. Pembangunan Teras Bangku
- A.3. Penerapan Sistem Agroforestry
- A.4. Reboisasi dan Penghijauan
- A.5. Penerapan Proses Produksi Bersih pada Kegiatan Agroindustri

## **B. Arahan Pengelolaan dan Pengembangan Sosekbud**

Pemanfaatan lahan yang kurang bijaksana oleh masyarakat yang bermukim pada wilayah DAS akan menimbulkan berbagai gangguan ekosistem antara lain terganggunya tata air DAS yang mengakibatkan banjir dan erosi. Lebih lanjut, kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan, penurunan produktivitas dan produksi usahatani, serta kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Untuk mencegah terjadinya gangguan tersebut di atas, maka perlu dilakukan pengelolaan DAS dengan melibatkan masyarakat yang bermukim pada DAS yang bersangkutan.

Program yang dapat dilakukan dalam kegiatan konservasi tanah dan air dengan melibatkan masyarakat yang bermukim pada wilayah DAS, antara lain melalui pembinaan terhadap masyarakat yang bersangkutan. Pembinaan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyuluhan
2. Penyediaan Sarana Produksi dan Permodalan
3. Pemasaran dan Pengolahan Hasil
4. Pemberian Insentif kepada Masyarakat
5. Pemberdayaan Kelembagaan

### **C. Arahan Kebijakan**

Latar belakang arahan kebijakan daerah adalah karena adanya berbagai kejadian/peristiwa menunjukkan bahwa penerima manfaat subsistem bendungan adalah masyarakat yang ada di daerah hilir. Masyarakat daerah hulu suatu DAS jarang sekali memperoleh manfaat langsung dari adanya subsistem bendungan. Namun dipihak lain masyarakat didaerah hulu selalu dibebani dengan berbagai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan konserasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan guna mencegah erosi dan sedimentasi.

Untuk itu, diperlukan arahan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pembangunan, antara lain:

1. Memberikan kredit murah kepada petani di daerah hulu dalam rangka pembuatan bangunan pengendalian erosi (contoh : pembuatan teras)
2. Memberikan subsidi pajak kepada petani di daerah hulu
3. Menghilangkan paradigma lama pengelolaan DAS, yaitu bagian hulu dikelola oleh Departemen Kehutanan (Balai Pengelolaan DAS) dan bagian hilir oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai pengelolaan sumberdaya air.
4. Mengajukan konsep satu sungai rencana (one river one plan) sehingga akan terjadi keterpaduan antara instansi terkait di bawah koordinasi pemerintah daerah setempat.



## **BAB IV UDARA**

### **4.1. Kondisi, Penyebab dan Dampak**

Berdasarkan hasil penelitian oleh KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) kerjasama dengan KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbang) pada tahun 2006 Kota Palembang pada 5 gas stasiun (SPBU), maka hasilnya rata-rata kadar timbel dalam bensin yang tertinggi di kota lain dengan nilai 0,1495 g/l. Dari tahun ke tahun kota Palembang terus dipasok dengan bensin bertimbang, hal ini dapat memperburuk masalah pencemaran udara di kota ini.

Secara umum kualitas udara ambien di wilayah Kota Palembang pada Tahun 2006 (Bapedalda Propinsi Sumsel, 2006) masih berada dibawah ambang batas yang dipersyaratkan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan, kecuali Tingkat Kebisingan pada titik-titik pantau tertentu telah melebihi Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

Pencemaran udara saat ini telah menjadi masalah yang cukup serius di kota-kota besar di Indonesia dalam decade terakhir ini dimana kendaraan bermotor merupakan penyebab utamanya.

Di bawah ini diuraikan beberapa parameter kualitas udara yang diukur dan dianalisa pada kegiatan pengukuran di persimpangan jalan protokol dalam wilayah Kota Palembang Tahun 2007, yakni Suhu, Humidity, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, gas CO, PM<sub>10</sub>, HC dan Pb serta Tingkat Kebisingan.

#### **a. Suhu (°C)**

Hasil studi Hulme and Nicola (1999) terhadap data historis rata-rata, suhu udara di Indonesia meningkat sebesar 0,3<sup>0</sup>C per tahun sejak tahun 1900. Temperatur global 2007 diperkirakan 0,54 °C diatas rata-rata jangka-panjang 14 °C (*Met Office – UK*).

Pengaruh kenaikan suhu akibat terjadinya faktor alam El Nino seperti yang sekarang terjadi diketahui suhu di Kota Jakarta mencapai 37<sup>0</sup>C. Pada kondisi normal suhu rata-rata antara 30<sup>0</sup>C -33<sup>0</sup>C.

Dari hasil pengukuran pada beberapa persimpangan jalan protokol wilayah Kota Palembang, suhu udara rata-rata kondisi sesaat pada beberapa lokasi sudah di atas normal. Suhu udara yang diperoleh rata-rata antara 30,4 °C - 36,9<sup>0</sup>C.

Lokasi-lokasi yang telah mempunyai suhu di atas normal yakni simpang 4 POLDA ( $T = 36,9^{\circ}\text{C}$ ), simpang Musi II – Soekarno Hatta ( $T = 36,8^{\circ}\text{C}$ ), simpang 4 Kertapati – Musi II ( $T = 36,5^{\circ}\text{C}$ ), Simpang 4 RSRK Charitas ( $T = 36,3^{\circ}\text{C}$ ), Simpang DPRD Sumsel Jl.Radial ( $T = 35,8^{\circ}\text{C}$ ), Terminal Alang-alang Lebar ( $T = 35,7^{\circ}\text{C}$ ), depan Pasar Cinde ( $T = 35,3^{\circ}\text{C}$ ), bundaran Air Mancur Masjid Agung ( $T = 35,2^{\circ}\text{C}$ ), Simpang Kenten Patal – PUSRI ( $T = 35,2^{\circ}\text{C}$ ), simpang 4 Jakabaring ( $T = 34,7^{\circ}\text{C}$ ), depan RSMH Sucofindo ( $T = 34,4^{\circ}\text{C}$ ).

Sedangkan suhu udara rendah berada pada beberapa lokasi, yakni di simpang 4 Kapten A.Rivai ( $T = 30,4^{\circ}\text{C}$ ), di depan Kantor Walikota ( $T = 30,7^{\circ}\text{C}$ ) dan simpang 4 Dolog – Veteran ( $T = 30,7^{\circ}\text{C}$ ).

#### **b. Kelembaban Udara (Humidity)**

Dari hasil pengukuran pada beberapa persimpangan jalan protokol wilayah Kota Palembang, kelembaban udara rata-rata kondisi sesaat pada beberapa lokasi diperoleh rata-rata antara 38,4% - 65,6%.

Lokasi-lokasi yang mempunyai kelembaban udara terendah berada pada lokasi simpang 4 POLDA ( $\text{RH} = 38,4\%$ ), simpang 4 Kenten Patal – PUSRI ( $\text{RH} = 39,6\%$ ), simpang 4 Kertapati – Musi II ( $\text{RH} = 40,8\%$ ), simpang 4 RSRK Charitas ( $\text{RH} = 41,1\%$ ), simpang 4 DPRD Sumsel Jl Radial ( $\text{RH} = 41,2\%$ ), simpang Musi II – Soekarno Hatta ( $\text{RH} = 41,5\%$ ) dan depan Pasar Cinde ( $\text{RH} = 41,9\%$ ).

Sedangkan kelembaban udara tertinggi berada pada Simpang 4 Dolog-Veteran ( $\text{RH} = 67,3\%$ ), di depan Kantor Walikota Palembang ( $\text{RH} = 65,6\%$ ) dan simpang 4 Kapten A.Rivai ( $\text{RH} = 65,6\%$ ).

#### **c. Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ )**

Dari hasil pengukuran dan analisa laboratorium nilai  $\text{NO}_2$  menunjukkan angka berkisar 27,947 – 655,183  $\mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ . Pada semua lokasi pengambilan sample masih berada di bawah Baku Mutu Udara Ambien yang diizinkan sebesar 400  $\mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ , kecuali nilai tertinggi berada di atas Baku Mutu Udara Ambien yakni pada lokasi di simpang 4 RSRK Charitas ( $\text{NO}_2 = 655,183 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ), simpang 4 POLDA ( $\text{NO}_2 = 517,073 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ), depan Kantor Walikota ( $\text{NO}_2 = 458,739 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ), di Pasar Cinde ( $\text{NO}_2 = 426,728 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ) dan depan RSMH – sucofindo ( $\text{NO}_2 = 419,512 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ). Pada daerah-daerah tertentu, nilainya cukup tinggi mendekati ambang batas yakni lokasi di simpang 4 Pasar Sekip ( $\text{NO}_2 = 382,622$

$\mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ). dan simpang 4 Musi II – Soekarno Hatta (  $\text{NO}_2 = 392,175 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ).

Sedangkan nilai-nilai terendah terdapat pada lokasi depan RSMH - sucofindo (  $\text{NO}_2 = 175,508 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), simpang 4 Kapten A.Rivai (  $\text{NO}_2 = 170,528 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), Simpang 4 Kertapati – Musi II (  $\text{NO}_2 = 127,947 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ) dan simpang 4 Jakabaring (  $\text{NO}_2 = 95,833 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ).

#### **d. Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ )**

Secara umum nilai konsentrasi  $\text{SO}_2$  masih berada di bawah ambang batas seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Udara Ambien yaitu  $900 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ . Ada beberapa lokasi, konsentrasi mendekati ambang batas yaitu pada bundaran air mancur depan Mesjid Agung Palembang (  $\text{SO}_2 = 484,75 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), simpang 4 RSRK Charitas (  $\text{SO}_2 = 451,91 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), simpang 4 Jakabaring (  $\text{SO}_2 = 440,955 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), depan Kantor Walikota Palembang (  $\text{SO}_2 = 432,00 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), Simpang 4 Kertapati – Musi II (  $\text{SO}_2 = 392,12 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), depan Pasar Cinde (  $\text{SO}_2 = 391,75 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), Simpang Kenten Patal – PUSRI (  $\text{SO}_2 = 382,00 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), dan Simpang 4 Lemabang (  $\text{SO}_2 = 371,66 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ).

Nilai konsentrasi  $\text{SO}_2$  terendah berada pada lokasi Simpang 4 Jakabaring (  $\text{SO}_2 = 128,58 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ) dan Simpang 4 Musi II – Soekarno Hatta (  $\text{SO}_2 = 198,42 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ).

#### **e. Carbon Monoksida (CO)**

Secara umum nilai konsentrasi CO masih berada di bawah ambang batas seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Udara Ambien yaitu  $30.000 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ . Ada beberapa lokasi, konsentrasi mendekati ambang batas yaitu simpang 4 RSRK Charitas (  $\text{CO} = 24.049,2 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), depan Pasar Cinde (  $\text{CO} = 22.904,0 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), Simpang 4 POLDA (  $\text{CO} = 19.468,4 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), Simpang Terminal Alang-alang Lebar (  $\text{CO} = 19.468,4 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ).

Nilai konsentrasi CO terendah berada pada lokasi di depan Kantor Walikota Palembang (  $\text{CO} = 5.726 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), Simpang 4 Kertapati - Musi II (  $\text{CO} = 5.726 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ), dan Simpang 4 Kenten Patal – PUSRI (  $\text{CO} = 6.871,2 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  ).

**f. Partikel Debu ( $PM_{10}$ )**

Nilai konsentrasi partikel debu tertinggi ada pada beberapa lokasi di wilayah Kota Palembang, hal ini disebabkan tingginya aktivitas transportasi pada lokasi tersebut. Konsentrasi  $PM_{10}$  tertinggi tersebut melebihi nilai ambang batas yang diizinkan yaitu  $150 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  dan lokasinya secara berturut-turut: Simpang 4 POLDA ( $PM_{10} = 291,5579 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ), simpang Terminal Alang-alang Lebar ( $PM_{10} = 265,3568 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ), Simpang 4 RSRK Charitas ( $PM_{10} = 244,131 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ), depan Pasar Cinde ( $PM_{10} = 205,3169 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ), Bundaran air Mancur depan Masjid Agung Palembang ( $PM_{10} = 155,827 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ) dan depan RS Mohammad Husein ( $PM_{10} = 155,570 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ).

Nilai konsentrasi  $PM_{10}$  mendekati nilai ambang batas yang diizinkan berada pada lokasi: di depan Kantor Walikota Palembang ( $PM_{10} = 141,1472 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ) dan simpang 4 Musi II – Soekarno Hatta ( $PM_{10} = 136,270 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ ).

Sedangkan lokasi di simpang 4 Kertapati – Musi II dan Simpang 4 Jl.Kaptan A. Rivai (Depan Mess PT BA) memiliki nilai  $PM_{10}$  terendah yakni  $63,098 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$  dan  $67,974 \mu\text{g}/\text{NM}^3/\text{jam}$ .

**g. HC (Hidrokarbon)**

Dari hasil pengukuran di lapangan konsentrasi HC pada umumnya berada di bawah Baku Mutu Udara Ambien yang dipersyaratkan yakni maksimal  $160 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ . Kisaran angka konsentrasi HC di wilayah Kota Palembang antara  $< 50 - 100 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ .

Konsentrasi HC yang hampir mendekati nilai ambang batas berada pada lokasi bundaran Air Mancur depan Masjid Agung Palembang ( $HC = 100 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ ), simpang Musi II – Soekarno Hatta ( $HC = 100 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ ), simpang 4 RSRK Charitas ( $HC = 100 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ ), simpang 4 POLDA ( $HC = 100 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ ), simpang 4 Jakabaring ( $HC = 100 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ ), simpang 4 Kertapati – Musi II ( $HC = 100 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ ) dan depan Pasar Cinde ( $HC = 90 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ ).

Lokasi-lokasi yang memiliki konsentrasi HC terendah adalah  $< 50 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , yakni simpang 4 Kenten Patal – PUSRI, simpang 4 Jakabaring dan simpang 4 Musi II – Soekarno Hatta.

#### ***h. Timbal (Pb)***

Dari hasil pengukuran di lapangan dan analisa laboratorium konsentrasi Pb pada umumnya masih berada di bawah Baku Mutu Udara Ambien yang dipersyaratkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2007 yakni  $2 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ . Kisaran angka konsentrasi Pb di wilayah Kota Palembang antara  $0.00687 - 1,656 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ .

Nilai Konsentrasi Pb yang diperoleh yakni pada lokasi simpang 4 Sekip =  $0,65775 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , simpang 4 DPRD Propinsi Sumsel Pb =  $0,49853 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , simpang 4 Patal – PUSRI Pb =  $0,48046 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , simpang 4 POLDA Pb =  $0,48248 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , simpang 4 Kapten A. Rivai Pb =  $0,40980 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , simpang 4 Jakabaring Pb =  $0,40833 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , depan RS Muhammad Husein Pb =  $0,3954 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , simpang 4 Dolog Pb =  $0,38791 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , simpang 4 Soekarno Hatta Pb =  $0,33235 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , Terminal Alang-alang Lebar Pb =  $0,21935 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ , simpang 4 Kertapati - Musi II Pb =  $0,19769 \mu\text{g}/\text{NM}^3$  dan simpang 4 Lemabang Pb =  $0,17954 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ .

Lokasi-lokasi yang memiliki konsentrasi Pb terendah adalah Simpang 4 RSRK Charitas (Pb= $0.00687 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ ) dan Simpang 4 Kapten A Rivai (Pb =  $0,076 \mu\text{g}/\text{NM}^3$ ).

#### ***i. Tingkat Kebisingan***

Dari hasil pengukuran tingkat kebisingan di seluruh titik-titik pantau di wilayah Kota Palembang semua berada di atas baku mutu Tingkat Kebisingan yang diizinkan ( $70 \text{ dB(A)}$ ) toleransi  $3 + \text{dB(A)}$ , yaitu kisaran antara  $70,5 \text{ dB(A)}$  -  $74,8 \text{ dB(A)}$ , kecuali di simpang 4 Musi II – Soekarno Hatta ( $71,2 \text{ dB(A)}$ ), simpang 4 Jakabaring ( $71,6 \text{ dB(A)}$ ), simpang Patal – PUSRI ( $70,8 \text{ dB(A)}$ ) dan simpang 4 Kertapati – Musi II ( $68,6 \text{ dB(A)}$ ).

Tingkat kebisingan yang telah melebihi ambang batas yakni berada di lokasi simpang 4 RSRK Charitas ( $74,9 \text{ dB(A)}$ ), depan RSMH (depan sucofindo) ( $74,2 \text{ dB(A)}$ ), bundaran air Mancur depan Masjid Agung Palembang ( $74,1 \text{ dB(A)}$ ), depan kantor Walikota Palembang ( $73,9 \text{ dB(A)}$ ), simpang 4 Dolog ( $73,9 \text{ dB(A)}$ ), depan Pasar Cinde ( $73,7 \text{ dB(A)}$ ), simpang 4 POLDA ( $73,5 \text{ dB(A)}$ ) dan simpang Terminal Alang-alang Lebar ( $73,4 \text{ dB(A)}$ ).

Lokasi-lokasi yang tingkat kebisingan yang telah melebihi ambang batas, hal ini dikarenakan lokasi-lokasi tersebut merupakan titik-titik simpul kemacetan lalu lintas dan jumlah kendaraan yang cukup banyak. Selain itu,

upaya penghijauan untuk mengurangi kebisingan masih kurang dilakukan pada jalur hijau.

Dampak dari pencemaran udara dapat dirasakan oleh setiap individu yang menghirup udara yang mengandung gas beracun, Dampak yang lain adalah terhadap ekosistem, misalnya terjadinya kerusakan hutan akibat hujan asam, jika hutan rusak, maka komponen biotik yang ada di dalamnya juga akan terganggu.

Perubahan iklim di permukaan bumi adalah akibat dari pencemaran udara, pencemaran itu berasal dari CO<sub>2</sub> yang di hasilkan oleh Negara-negara maju dengan membakar bahan fosil.

Polutan SO<sub>2</sub> mempunyai pengaruh pada manusia dan hewan pada konsentrasi jauh lebih tinggi dari pada yang di perlukan untuk merusak tanaman. Pengaruh utama polutan SO<sub>2</sub> terhadap manusia adalah iritasi system pernapasan. SO<sub>2</sub> (sulfuroksida) di anggap polutan berbahaya bagi kesehatan terutama terhadap orang tua dan penderita yang mengalami penyakit kronis pada system pernafasan.

Telah lama diketahui bahwa kontak antara CO dengan manusia dapat menyebabkan kematian, Tetapi kontak CO dengan manusia pada konsentrasi rendah dapat mengganggu kesehatan.

Polusi udara oleh CO juga disebabkan oleh asap rokok, Asap rokok mengandung dengan CO konsentrasi lebih dari 20.000 ppm. Selain berbahaya tiap orang merokok, adanya asap rokok yang mengandung CO juga berbahaya bagi orang yang berada di sekitarnya karena asapnya dapat terhisap.

Manusia mudah terserang pusing, sakit kepala, daya tangkap melemah akibat gas CO, radang saluran pernafasan akibat gas SO<sub>2</sub>, iritasi mata, malfungsi pada paru-paru akibat dari gas NO<sub>2</sub> dan berbagai penyakit lain dari buangan yang beredar di atas udaranya.

Secara umum sumber pencemaran udara dapat terjadi karena factor alamiah, yaitu peristiwa yang terkena alam sehingga menimbulkan pencemaran yang dapat mengganggu manusia,hewan,dan tumbuhan ( letusan gunung, dan peristiwa di desa Bekucuk ), atau terjadi karena buatan manusia (limbah industri, pemukiman, dan lain-lain). Hidrokarbon merupakan bentuk gas yang memberikan reaksi bersifat inert, yaitu agak lambat jalannya dan dapat menyebabkan asphyxiant (sesak napas ringan). Gas ini secara langsung tidak menimbulkan efek yang merugikan kesehatan manusia dan

dapat toleransi oleh tubuh melalui pernapasan serta tidak memberikan efek sistemik.

Berbahayanya, apabila polutan ini mengadakan reaksi di bawah sinar matahari, akan membentuk photochemical oxidant (sekunder polutan yang terbentuk oleh sebab pengaruh sinar Matahari pada Oksidasi Nitrogen dan Hidrokarbon di Udara), yang terhadap tanaman berpengaruh necrosis, chlorosis, dan gangguan pertumbuhan. Pada manusia dapat menyebabkan asphexia (gangguan pernapasan) berat dan bersifat anaestetik terhadap susunan sarap, serta membuat mata terus berair karena iritasi.

Polutan yang diemisikan oleh sumber emisi tidak bergerak dan sumber bergerak seperti Hidrokarbon (HC) dapat menyebabkan iritasi mata, batuk dan juga berpotensi terhadap perubahan kode genetik,

Partikulat matter (PM<sub>10</sub> adalah debu yang berukuran 10 micron) adalah pencemar yang apabila masuk ke dalam system pernafasan dapat menyebabkan bronchitis, asma, gangguan kardiovaskuler dan berpotensi menyebabkan kanker.

Timbal (Pb) yang dikenal juga dengan timah hitam merupakan neurotoxin atau racun syaraf yang dapat mengakibatkan penurunan tingkat kecerdasan dan kemampuan otak pada anak-anak, pada orang dewasa dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, anemia, mengurangi fungsi reproduksi dan kematian.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pencemaran udara antara lain :

- Kecepatan angin : Semakin cepat angin semakin cepat pula perluasan derajat pencemaran; meski disisi lain diharapkan terjadi penipisan derajat konsentrasi yang lebih cepat pula.
- Kemampuan Atmosfer untuk meningkatkan atau menekan gerakan udara secara vertical ( stabilitas udara) dapat memperluas atau mempertipis volume pencemaran.
- Inversi dan turunnya hujan dapat pula menipiskan pencemaran udara. Namun dampak negatif yang mungkin di timbulkan adalah terbawahnya polutan oleh hujan yang dapat menimbulkan pencemaran Air atau Tanah.

Pengaruh utama dari kebisingan terhadap tubuh manusia adalah timbulnya gangguan pandangan dan ketulian, mula-mula efek kebisingan ini bersifat sementara dan pengaruhnya akan hilang setelah kebisingan berlalu, namun apabila secara terus-menerus berada dalam lingkungan yang bising, daya pandangan akan hilang dan tak dapat pulih kembali.

Beberapa dampak yang mungkin timbul karena kebisingan adalah :

- ❖ Meningkatnya tekanan darah.
- ❖ Meningkatnya Kadar Kolesterol.
- ❖ Melemahnya sistem kerja jantung.
- ❖ Gangguan produksi Hormon.
- ❖ Gangguan alat pendengaran.
- ❖ Gangguan terhadap Janin dalam Kandungan.
- ❖ Stres ( gangguan Jiwa).

Pencemaran suara atau kebisingan terjadi di Kota-Kota besar sebagai akibat digunakannya mesin-mesin Industri, Diesel pembangkit tenaga Listrik, Deru pesawat dan kendaraan bermotor. Kebisingan ini mengganggu penduduk sekitar jalan raya atau lapangan terbang, selain dapat mengakibatkan tuli atau gangguan kejiwaan, kebisingan dapat pula menimbulkan penyakit jantung.

#### 4.2. Respon Permasalahan terhadap Media Udara

Respon permasalahan terhadap media udara adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang untuk kendaraan tipe baru dan kendaraan bermotor lama.
2. Perlu dilakukan pemantauan mutu udara ambien pada persimpangan jalan protokol di wilayah Kota Palembang.
3. Perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan emisi kendaraan bermotor secara periodik.
4. Perlu dilakukan pengukuran kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan secara periodik sehingga dapat dijadikan sebagai data dasar bagi perencanaan sistem transportasi, program langit biru, dan penetapan perencanaan pengelolaan kualitas udara.
5. Dalam upaya mengurangi sebaran debu, penyerapan gas dan meredam kebisingan, kiranya perlu digalakkan program penghijauan berupa penanaman pohon jenis-jenis tertentu yang dapat menyerap gas-gas berbahaya dan tanaman hias di pinggir jalan dan jalur hijau.

6. Setiap pengguna jalan yakni kendaraan bermotor terutama roda dua disarankan untuk menggunakan masker.
7. Perlu pengadaan bahan bakar minyak bebas Timbal (Pb) serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.

Cara pencegahan kebisingan antara lain sebagai berikut :

- Mengurangi kebisingan pada sumbernya, dengan menempatkan alat peredam suara pada alat mengeluarkan bunyi.
- Memberi penghalang pada jalan transmisi suara, usaha ini dilakukan dengan jalan memberi Isolasi ruangan sehingga suara yang keras tidak memasuki ruangan, penanaman tumbuhan disekitar rumah atau bangunan dapat meredam suara bising yang mengganggu kebisingan.
- Pemakaian sumbat telinga (ear plug).

## BAB V . LAHAN DAN HUTAN

### 5.1. Kondisi, Penyebab dan Dampak

Kota Palembang berada pada topografi yang relatif datar. Dataran rendah dominan terutama pada daerah sekitar Sungai Musi, Sungai Ogan dan Sungai Komering dengan ketinggian tempat antara 2-4 m. Daerah utara memiliki ketinggian bervariasi yaitu antara 4-20 m di atas permukaan laut.

Apabila diperhatikan antara daerah Kota Palembang yang dibelah oleh Sungai Musi terdapat dua karakter yang berbeda. Bagian wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar, dan pasang maksimum Sungai Musi  $\pm 3,75$  m, namun demikian terdapat areal yang lebih tinggi merupakan hasil reklamasi.

Daerah wilayah Seberang Ilir mempunyai variasi topografi dengan ketinggian 4 – 20 m di atas permukaan laut. Pada daerah-daerah tertentu masih ditemui cekungan-cekungan.

Secara geografis wilayah Kota Palembang terletak antara  $1,3^{\circ}$  sampai  $4,15^{\circ}$  LS dan  $103,40^{\circ}$  sampai  $106,00^{\circ}$ BT.

Kota Palembang dengan luas wilayah (hasil pengukuran peta) sekitar 36.484,89 hektar, memiliki kawasan terbangun sekitar 44,59%, terdiri atas kawasan perdagangan dan jasa, pemerintahan/perkantoran, perumahan dan permukiman, industri, jaringan jalan dan utilitas kota. Sementara pemanfaatan lainnya berupa lahan non-erbangun seperti sungai, rawa, kolam, RTH, tanah bencah (umumnya digunakan untuk sawah/kebun), hutam semak belukar, dan tanah kosong lainnya. Luas rawa relatif kecil yaitu sekitar 3,83 %. Hal ini disebabkan kegiatan foto udara dilakukan pada musim kemarau, sehingga lahan yang sesungguhnya merupakan kawasan rawa menjadi kering, sehingga yang tampak adalah kegiatan pertanian seperti sawah dan kebun campuran (palawija).

Beberapa kawasan yang dianggap memiliki arti strategis bagi Kota Palembang, meliputi Kawasan Bukit Siguntang dan Situs Sriwijaya Karang Anyar (Kecamatan Ilir Barat II), Kawasan Hutan Wisata Pundi Kayu (Kecamatan Sukarami), dan Rencana Kawasan Reklamasi (Kecamatan Seberang Ulu I). Sedangkan kawasan strategis yang terdapat di pusat kota meliputi kawasan sekitar Jembatan Ampera sisi Seberang Ilir, mulai dari Pasar 16 Ilir, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II dan Benteng Kuto Besak.

Selain itu, kawasan pasar Sekanak yang terdapat di sepanjang Jalan Merdeka (dari Kantor Walikota Palembang – DPRD hingga ke sekitar Masjid Agung), banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa studi dan perencanaan yang telah dilakukan oleh berbagai instansi pusa/daerah, walaupun belum terlihat tindak lanjutnya. Lahan kosong berupa rawa dan tanah bencah sebagian sudah ditimbun untuk pembangunan perumahan dengan tidak memperhatikan karakteristik fisik dasarnya sebagai daerah rawa/tanah berair. Sedangkan lahan yang digunakan untuk daerah / jalur hijau masih sangat sedikit.

Tabel 5.1. Pemanfaatan Lahan Kota Palembang Tahun 2004

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (ha)	(%)
1.	Perumahan dan Pemukiman	10.909,40	29,90
2.	Perdagangan dan Jasa	248,45	0,68
3.	Pemerintahan dan Perkantoran	199,05	0,55
4.	Industri	759,91	2,08
5.	Sarana dan Fasilitas	269,60	0,74
6.	Jalan (arteri, kolektor, lokal)	3.884,06	10,65
7.	Hutan	2.073,42.	5,68
8.	Rawa	1.396,35	3,83
9.	Pertanian (perkebunan, sawah,peternakan)	6.217,05	17,04
10.	RTH (taman kota, jalur hijau, pemisah jalan)	26,73	0,07
11.	Kolam	15,59	0.04
12.	Sungai	1.702,23	4,67
13.	Lahan Kosong (tegalan,semak belukar)	8.457,66	23,18
14.	Lain-lain	325,43	0,89
	LUAS TOTAL	36.484,94	100,00

Sumber: RTRW Kota Palembang 2004-2014

Kawasan lindung yang ada di Kota Palembang sesuai dengan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 adalah:

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan ini berupa sempadan Sungai Komering, Sungai Ogan, Sungai Keramasan dan anak-anak sungai serta kolam retensi. Penetapan kawasan perlindungan setempat juga meliputi rawa Kota Palembang, yaitu 5,08% dari 11.754,4 ha atau 32,22% rawa kawasan lidnung yaitu 1.852,36 ha.

Penetapan kawasan lindung ini untuk menunjang fungsi ekologis tatanan penggunaan sumberdaya lami di Kota Palembang.

b. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya yang ditetapkan di wilayah Kota Palembang adalah Hutan Wisata Alam Pundi Kayu, Taman Purbakala Situs, Makam Raja-raja dan pemukiman lingkungan perumahan tradisional Palembang (RTRW Kota Palembang 2004 – 2014)

Pemerintah Kota Palembang bertekad untuk menjadikan luas hutan kota dan penghijauan sekitar 30%. Saat ini hutan yang ada di Kota Palembang baru sekitar 2.073,42 hektar atau sekitar 5,68% dari luas kota. Kegiatan penghijauan secara kolektif maupun sendiri-sendiri akan meningkatkan luasan hutan kota. Bila tanaman yang ditanam di halaman penduduk, perkantoran, kuburan, taman dan hutan kota itu sendiri digolongkan ke dalam hutan kota, maka luasannya saat ini melebihi angka 20%. Hutan di kota ini merupakan kawasan tangkapan dan sarana yang cukup baik untuk konservasi air.

Gangguan terhadap hutan atau lahan bervegetasi di Kota Palembang dapat secara nyata mengurangi air yang masuk ke dalam tanah, meningkatkan porsi air limpasan pada suatu hamparan akibat berkurangnya rembesan air hujan ke dalam tanah. Kondisi tersebut menyebabkan kejadian banjir dengan genangan yang cukup tinggi dan lama. Kondisi ini diperburuk oleh adanya penyumbatan saluran dan adanya pasang surut air sungai Musi yang dipacu oleh pasang naik air laut.

Masalah-masalah yang dihadapi yang terkait dengan sumberdaya lahan, antara lain:

1. Data tentang sumberdaya alam yang ada merupakan perpaduan antara beberapa sumber, yakni:
  - Data penggunaan hutan dari instansi kehutanan
  - Data persawahan dan pertanian dari instansi pertanian
  - Data perairan dari instansi pengairan

Masalah yang timbul dari data yang ada adalah masing-masing instansi memiliki data sendiri-sendiri yang berasal dari perhitungan penggunaan yang berbeda.

2. Semua instansi yang terkait dalam penyusunan/inventarisasi sumberdaya alam belum melaksanakan kegiatan yang berdasarkan atas data operasional yang sama yaitu peta dasar sumberdaya alam yang telah ada, untuk keperluan pemanfaatan data dasar serta langkah penanganan yang diperlukan

Konversi lahan rawa pertanian dan non-pertanian menjadi pemukiman, gedung perkantoran, industri, hotel/restoran dan proyek lain telah menimbulkan dampak yang cukup berarti. Dampak kegiatan-kegiatan tersebut adalah rusaknya keseimbangan alam di Kota Palembang, dimana pada waktu hujan terjadi penggenangan di banyak tempat di kota ini. Pendrainasean air makin lama makin sulit apalagi jaringan drainase yang ada terbatas kehandalannya. Banjir di Kota Palembang semakin lama telah diperburuk oleh: a) pasang air laut yang ditahan oleh penyempitan muara sungai akibattingginya sedimentasi dari hulu sungai maupun dari daerah transmigrasi sekitar dan b) pendangkalan sungai-sungai utama seperti Sungai Musi, Komering dan Ogan.

Penyebab utama banjir dan genangan di Kota Palembang antara lain adalah sebagai berikut:

- Kondisi topografi Kota Palembang yang relative datar dan rendah sehingga sangat dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Musi
- Adanya pendangkalan Sungai Musi dan anak-anak sungainya, kondisi ini memerlukan upaya normalisasi sungai
- Semakin meningkatnya pembangunan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan penimbunan rawa. Hal ini perlu dikendalikan/ditertibkan
- Penurunan kinerja drainase yang disebabkan oleh sampah, pendangkalan dan kerusakan. Keadaan ini membutuhkan peningkatan manajemen persampahan
- Kurang tersedianya kolam-kolam retensi, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan system tata air.
- Belum adanya konsep drainase terpadu dan penetapan area konservasi rawa
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase

## **5.2. Respon Permasalahan pada Media Lahan dan Hutan**

Upaya pengendalian terhadap permasalahan lahan dan hutan yang ada, antara lain:

1. Menerapkan tata ruang kota yang konsisten, sehingga lahan yang diperuntukkan untuk berbagai penggunaan mempunyai kejelasan
2. Pembangunan kolam retensi dan perbaikan jaringan drainase hendaknya terus digalakkan. Kolam retensi selama ini kurang terasa manfaatnya karena dibangun pada daerah rendah. Kolam retensi hendaknya dibangun di daerah lebih atas guna mencegah pengaliran air dalam jumlah besar pada daerah yang lebih rendah
3. Pembangunan hutan kota, jalur hijau dan penghijauan harus terus dilaksanakan guna mendukung konservasi sumberdaya air agar tidak kekeringan di musim kemarau dan tidak pula banjir di musim penghujan.

## **BAB VI**

### **KEANEKARAGAMAN HAYATI**

#### **6.1 Kondisi, Penyebab dan Dampak**

Potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna berupa hutan kota dan hutan kemasyarakatan di Kota Palembang cukup potensial untuk menunjang kelestarian beberapa fauna di Kota Palembang. Data mengenai perubahan potensi flora dan fauna belum tersedia. Perubahan tersebut tetap terjadi antara lain pada hutan kemasyarakatan seperti lahan pertanaman karet, kebun bambu dan kebun buah akibat pembuatan jalan dan proyek lainnya.

Hutan-hutan di Sungai Gerong, Bukit Siguntang, Pundi Kayu dan tempat lainnya merupakan habitat yang tetap baik bagi beberapa spesies kera.

Sejumlah spesies fauna terdapat di Kota Palembang baik fauna darat maupun fauna akuatik. Di antara fauna darat yang banyak dijumpai adalah hewan menyusui, burung, reptil, keong dan serangga. Hewan menyusui yang dijumpai berjumlah 10 spesies, sedangkan yang dilindungi hanya 1 spesies yakni napuh (jenis-jenis *tragulus*). Napuh tersebut dijumpai pada hutan-hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sako dan Sukarami. Sedangkan burung terdapat sekitar 12 spesies, 6 spesies yang telah diteliti dan 4 spesies yang dilindungi. Di antara spesies burung yang diteliti adalah bangau tong-tong dan elang. Bangau dan tong-tong banyak dijumpai di rawa-rawa sedangkan elang dijumpai pada pohon-pohon di hutan-hutan yang ada di Kota Palembang.

Reptil dan amfibi dijumpai dengan masing-masing 10 dan 6 spesies. Semua spesies amfibi telah diteliti dan 5 spesies termasuk yang dilindungi. Di antara spesies amfibi yang dilindungi adalah penyu dan ular. Fauna lain yang dijumpai adalah keong. Dari ke-4 spesies keong yang ada tidak satupun yang dilindungi.

Serangga yang dijumpai di Kota Palembang sekitar 2.000 spesies dan sekitar 300 spesies pernah diteliti. Kebanyakan serangga yang ada di sini merupakan hama tanaman, vector penyakit, musuh alami hama serangga lain (predator dan parasitoid).

Flora yang dijumpai di Kota Palembang jumlahnya sekitar 50 spesies. Dari jumlah itu sekitar 20 spesies yang pernah diteliti dan sekitar 10 spesies yang dilindungi. Di antara ke-10 spesies flora yang dilindungi tersebut adalah cempaka telok (maskot Kota Palembang) dan jati.

## **6.2. Respon Permasalahan pada Media Keanekaragaman Hayati**

Beberapa pengendalian yang perlu dilaksanakan adalah:

- Untuk habitat
  1. Mencegah keutuhan habitat berupa hutan kota, kelompok pepohonan, hutan kemasyarakatan dan habitat lainnya
  2. Meneliti aspek-aspek ekologis dalam rangka menemukan strategi yang tepat untuk pengelolaan hutan kota sebagai habitat flora dan fauna tertentu
  3. Melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap upaya-upaya yang berhubungan dengan pengrusakan hutan kota dan hutan kemasyarakatan yang ada.
  
- Untuk Flora dan Fauna
  1. Melakukan upaya pengawasan pemburuan liar
  2. Melakukan penangkaran/pengembangbiakkan hewan lindung, kemudian setelah dewasa di lepas ke hutan. Hewan yang perlu ditangkarkan tersebut antara lain napuh penyu hijau, ular, elang, buaya, biawak, ikan arwana, ikan belido, bangau tong-tong dan ikan tempalo. Sedangkan flora yang perlu dilestarikan adalah cempako telok dan jati.

## **BAB VII**

### **AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **7.1. Air / Sungai**

Program Pengendalian Pencemaran Air dalam rangka menunjang Visit Musi 2008 melalui Dana DAK tahun 2008 yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peraturan daerah tata ruang untuk daerah aliran sungai (DAS) sesuai Garis Sempadan Sungai pada setiap kota/kabupaten yang dilintasi oleh Sungai Musi dan khusus untuk Kota Palembang sudah ada.
2. Mengatur pemanfaatan ruang DAS melalui pemberian izin industri dan izin-izin lainnya yang dapat menimbulkan dampak penting bagi lingkungan sekitar dan diterapkan melalui kajian lingkungan.
3. Penataan tepian Sungai Musi dengan pembuatan retaining wall setinggi 150 meter
4. Pemanfaatan eceng gondok yang diolah menjadi handycraft dan atau pupuk organik dengan menggunakan tenaga lokal di sepanjang pinggir sungai Musi di beberapa titik di wilayah kabupaten/kota yang dilalui Sungai Musi dengan mendirikan tempat usaha
5. Pengendalian system sanitasi rumah rakit dan rumah sepanjang pinggiran/bantaran Sungai Musi melalui pengadaan WC komunal terapung atau setiap rumah rakit (program pokok) dengan mempersiapkan WC individu pada rumah rakit/rumah pada bantaran Sungai Musi dan anak sungai di Kota Palembang, dimana ada sekitar 708 rumah rakit yang ada disepanjang Sungai Musi
6. Laboratorium terapung untuk akses pemantauan dan monitoring rutin dengan kapal laboratorium.
7. Kapal tinja untuk pengangkutan tinja sehubungan dengan pengadaan WC komunal terapung.

Selain itu, program pengendalian pencemaran air terutama sungai, antara lain:

1. Membuat DAM sepanjang 600 m kiri kanan dan bisa dijadikan tempat areal rekreasi.
2. Membuat saluran drainase di dalam wilayah Kota Palembang
3. Membuat corl box untuk menampung limpasan air hujan
4. Membangun kolam retensi di dalam wilayah kota Palembang
5. Melakukan penataan bantaran Sungai Sekanak dalam rangka menunjang Program Cinta Kasih dan Adipura Tahun 2007/2008.

## **7.2. Udara**

Program Pengendalian Pencemaran Udara dalam rangka menunjang program Langit Biru, antara lain:

1. Melakukan pengukuran emisi gas buang kendaraan bermotor dan kualitas udara ambien dalam wilayah Kota Palembang untuk dijadikan kebijakan dalam rencana peraturan tentang peremajaan kendaraan bermotor terutama angkutan umum.
2. Melakukan penghijauan untuk menyerap polusi udara
3. Perlu dilakukan pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang untuk kendaraan tipe baru dan kendaraan bermotor lama.
4. Perlu dilakukan pemantauan mutu udara ambien pada persimpangan jalan protokol di wilayah Kota Palembang.
5. Perlu dilakukan pengukuran kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan secara periodik sehingga dapat dijadikan sebagai data dasar bagi perencanaan sistem transportasi, program langit biru, dan penetapan perencanaan pengelolaan kualitas udara.
6. Dalam upaya mengurangi sebaran debu, penyerapan gas dan meredam kebisingan, kiranya perlu digalakkan program penghijauan berupa penanaman pohon jenis-jenis tertentu yang dapat menyerap gas-gas berbahaya dan tanaman hias di pinggiran jalan dan jalur hijau.
7. Setiap pengguna jalan yakni kendaraan bermotor terutama roda dua disarankan untuk menggunakan masker.
8. Perlu pengadaan bahan bakar minyak bebas Timbal (Pb) serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.

### **7.3. Sosial Ekonomi Masyarakat**

Program pengendalian pencemaran terkait dengan sosial ekonomi masyarakat, yakni antara lain:

1. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, betapa pentingnya lingkungan sehat dalam rangka menunjang Program Palembang sehat Tahun 2008
2. Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengusaha, pelaku-pelaku pengelola lingkungan hidup dan masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2005. Palembang Dalam Angka 2005/2006. BPS Palembang

Kajian Evaluasi Kualitas Air Sungai Musi dan Anak-anak Sungainya dalam Wilayah Kota Palembang. 2005. Bapedalda Kota Palembang Pemerintah Kota Palembang kerjasama dengan PPLH Unsri.

Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung.

KLH RI/KPBB 2006. Indonesian Fuel Quality Report. 2006. Clean Fuel: A Requirement for Air Quality Improvement.

Peraturan Gubernur Sumsel No. 17 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Udara Ambien.

*RTRW Kota Palembang 2004-2014*

Stasiun Klimatologi Klas II Kenten Palembang. 2007

Tim Bapedalda Kota Palembang. 2007. Laporan Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Persimpangan Jalan Protokol dalam Wilayah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang.

Tim Penyusun. 2006. Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Kota Palembang 2004-2008. Pemerintah Kota Palembang.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah